

**IJTIHAD POLITIK HASYIM MUZADI:
STUDI PEMIKIRAN POLITIK**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Ushuluddin
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
untuk memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Filsafat Islam (S.Fil.I)**

**OLEH:
MISBAHOL MUNIR
NIM: 04511726**

**JURUSAN AQIDAH DAN FILSAFAT
FAKULTAS USHULUDDIN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2009**

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Misbahol Munir
NIM : 04511726
Fakultas : Ushuluddin
Jurusan/Prodi : Aqidah Filsafat (AF)
Alamat Rumah : Jl. Pemuda Talesek Guluk-Guluk Sumenep 69463
Nomor Hp/Telp. : 081392462986
Alamat : Jl. Bimokurdo no. 74 Sapen Yogyakarta
Judul Skripsi : *Ijtihad Politik Hasyim Muzadi: Studi Pemikiran Politik*

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Skripsi yang saya ajukan adalah benar *asli* karya ilmiah yang saya tulis sendiri.
2. Bilamana skripsi telah di munaqosyahkan dan diwajibkan revisi, maka saya bersedia dan sanggup merevisi dalam waktu 2 (dua) bulan terhitung dari tanggal munaqosyah. Jika ternyata lebih dari 2 (dua) bulan revisi skripsi belum terselesaikan maka saya bersedia dinyatakan gugur dan bersedia munaqosyah kembali dengan biaya sendiri.
3. Apabila dikemudian hari ternyata diketahui bahwa karya tersebut bukan karya ilmiah saya (plagiasi), maka saya bersedia menanggung sanksi dan dibatalkan gelar kesarjanaan saya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 17 Juli 2009

Saya yang menyatakan,

(Misbahol Munir)

NOTA DINAS PEMBIMBING

Yogyakarta, 17 Juli 2009

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ushuluddin
UIN Sunan Kalijaga
Di
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Sesudah melakukan beberapa kali bimbingan baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan, dan setelah membaca skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

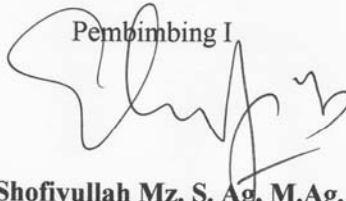
Nama Mahasiswa : Misbahol Munir
NIM : 04511726
Jurusan : Aqidah dan Filsafat
Judul skripsi : **IJTIHAD POLITIK HASYIM MUZADI: STUDI PEMIKIRAN POLITIK**

Maka selaku pembimbing/ pembantu pembimbing kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah layak di ajukan untuk di munaqosyahkan.

Demikian, mohon dimaklumi adanya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Pembimbing I



H. Shofiyullah Mz. S. Ag, M.Ag.
NIP. 19710528 200003 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Yogyakarta, 17 Juli 2009

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ushuluddin
UIN Sunan Kalijaga
di
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Sesudah melakukan beberapa kali bimbingan baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan, dan setelah membaca skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

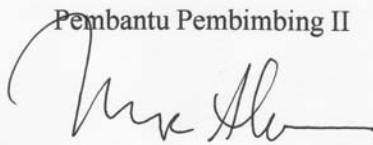
Nama Mahasiswa : Misbahol Munir
NIM : 04511726
Jurusan : Aqidah dan Filsafat
Judul skripsi : **IJTIHAD POLITIK HASYIM MUZADI: STUDI
PEMIKIRAN POLITIK**

Maka selaku pembimbing/ pembantu pembimbing kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah layak di ajukan untuk di munaqosyahkan.

Demikian, mohon dimaklumi adanya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Pembantu Pembimbing II



Dr. Munawar Ahmad, M. Si
NIP. 19691017 200212 1 001



PENGESAHAN

Nomor: UIN.02/DU/PP.00.9/1234/2009

Skripsi dengan judul : *Ijtihad Politik Hasyim Muzadi: Studi Pemikiran Politik*

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

1. Nama : Misbahol Munir
2. NIM : 01520850
3. Program Sarjana Strata 1 Jurusan : AF

Telah dimunaqosyahkan pada hari : Senin, tanggal : 27 Juli 2009 dengan nilai : 95 (A) dan dinyatakan syah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu.

PANITIA UJIAN MUNAQOSYAH :

Ketua Sidang

H. Shofiyullah Mz. S. Ag. M. Ag.
NIP. 19710528 200003 1 001

Penguji I

H. Shofiyullah Mz. S. Ag. M. Ag.
NIP. 19710528 200003 1 001

Penguji II

Fahrudin Faiz, S. Ag. M. Ag.
NIP. 197 50816200003 1 001

Yogyakarta, 27 Juli 2009

UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Ushuluddin
DEKAN

Dr. Sekar Ayu Aryani, M. Ag.
NIP. 19591218 198703 2 001

MOTTO

Life is Hope...!

Cause' hope is a good thing

*They from nothing to be something**

* *Shawshank Movie*

PERSEMBAHAN

*Teruntuk:
Muhabbir Ayahanda sekaligus guruku
dan Ibunda tersayang Latifah,
Mbakku Azizah,
Kakak Iparku Marzuqi
Dan Kedua Keponakanku Alfin dan Syarif
Serta My Sweet Honey Vi2*

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi ini, bersumber dari pedoman Arab-Latin yang diangkat dari *Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543 b/U/1987*, selengkapnya sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
	Bâ'	b	be
	Tâ'	t	te
ﺀ	Sâ'	ś	es (dengan titik di atas)
ﺞ	Jîm	j	je
ﺡ	Hâ'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
ﻚ	Khâ'	kh	ka dan ha
ﺪ	Dâl	d	de
ﺯ	Zâl	z	zet (dengan titik di atas)
ﺭ	Râ'	r	er
ﺰ	zai	z	zet
ﺲ	sin	s	es
ﺴ	syin	sy	es dan ye
ﺶ	sâd	ş	es (dengan titik di bawah)
ﺸ	dâd	đ	de (dengan titik di bawah)
ﺘ	tâ'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ﺰ	zâ'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ﺀ	'ain	‘	koma terbalik di atas
ﻎ	gain	g	ge
ﻑ	fâ'	f	ef
ﻕ	qâf	q	qi

ك	kâf	k	ka
ل	lâm	l	`el
م	mîm	m	`em
ن	nûn	n	`en
و	wâwû	w	w
هـ	hâ'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	yâ'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis rangkap

متعددة عدة	Ditulis Ditulis	Muta'addidah 'iddah
---------------	--------------------	------------------------

C. Ta' Marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حكمة علة	Ditulis Ditulis	Hikmah 'illah
-------------	--------------------	------------------

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	Ditulis	Karâmah al-auliyâ'
----------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	Ditulis	Zakâh al-fiṭri
------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

فَعَلَ	fathah	Ditulis	A
		Ditulis	fa'ala
ذَكَرَ	kasrah	Ditulis	i
		Ditulis	żukira
يَذُوبُ	dammah	Ditulis	u
		Ditulis	yażhabu

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جَاهِلِيَّة	Ditulis	â
		Ditulis	jâhiliyyah
2	fathah + ya' mati تَنْسَى	Ditulis	â
		Ditulis	tansâ
3	kasrah + ya' mati كَرِيم	Ditulis	î
		Ditulis	karîm
4	dammah + wawu mati فُرُوض	Ditulis	û
		Ditulis	furûd

F. Vokal Rangkap

1	fathah + ya' mati بَيْنَكُمْ	Ditulis	ai
		Ditulis	bainakum
2	fathah + wawu mati قَوْل	Ditulis	au
		Ditulis	qaul

G. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

النتم أعدت لئن شكرتم	Ditulis Ditulis Ditulis	a'antum u'iddat La'in syakartum
----------------------------	-------------------------------	---------------------------------------

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

القرآن القياس	Ditulis Ditulis	al-Qur'ân Al-Qiyâs
------------------	--------------------	-----------------------

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

A. السماء الشمس	Ditulis Ditulis	as-Samâ' Asy-Syams
--------------------	--------------------	-----------------------

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوي الفروض أهل السنة	Ditulis Ditulis	Ẓawî al-furûd ahl as-sunnah
-------------------------	--------------------	--------------------------------

ABSTRAK

Diskusur tentang tatanan masyarakat ideal atau politik telah banyak dilakukan. Namun, kajian tentang ijtihad politik Hasyim Muzadi dalam menggabungkan ajaran islam dan ide-ide kebangsaan serta mengkontektualisasikan dengan kehidupan politik Indonesia belum pernah dilakukan. Maka disinalah letak signifikansi kajian ini.

Hasyim Muzadi, sebagai intelektual dan agamawan, mencoba menawarkan sebuah solusi bagi tercapainya cita-cita kolektif bangsa. Kegelisahan mendalam Hasyim atas kondisi objektif bangsa mendorongnya untuk merefleksikan dengan serius problematika kebangsaan seraya melakukan ijtihad politik yang terekspresikan dalam bentuk pemikiran politiknya. Penulis ingin mengetahui lebih utuh dan mendalam tentang gugusan pemikiran politik Hasyim terutama terkait dengan pengelaborasi ajaran Islam dan ide-ide kebangsaan.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kepustakaan murni (*library research*). Teknik pengumpulan data diperoleh dari dan melalui data primer serta data sekunder. Data primer, didapatkan dari pengkajian mendalam atas karya-karya Hasyim Muzadi yang sudah dibukukan, sedangkan data sekunder penulis dapatkan dari artikel-artikel lepas yang dipublikasikan di berbagai tempat. Untuk menganalisis data penulis mempergunakan metode khusus yaitu, diskriptif-analitis. Dalam segi pendekatan, penulis menggunakan pendekatan historis-filosofis.

Hasil yang diperoleh penulis dalam skripsi ini adalah ijtihad politik Hasyim Muzadi dalam menggabungkan ajaran Islam dan ide-ide kebangsaan memiliki koherensi. Yakni kedua ajaran tersebut mendorong akan terciptanya masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Hal tersebut sejalan dengan cita-cita dan ide-ide kebangsaan sebagaimana termaktub dalam Undang Undang Dasar (UUD) 1945. Islam juga mengajarkan semangat persaudaraan yang dapat mengantar masyarakat menuju keharmonisan dan kebersamaan hidup dalam perbedaan.

Islam juga menginginkan terwujudnya ko-eksistensi umat islam dan umat pemeluk agama lain dalam sebuah komunitas yang diikat oleh kesatuan identitas sebagai bangsa, yang dikenal dengan konsep *ukhuwah wathaniyah* (persaudaraan bangsa). Selain itu juga, Islam menjunjung tinggi rasa solidaritas sesama umat manusia yang beradab, dan senantiasa mendorong terbentuknya *ukhuwah basyariyah* (persaudaraan manusia) yang melampaui sekat-sekat etnis, suku dan ras.

Selanjutnya terdapat relevansi atas pemikiran politik Hasyim Muzadi dalam konteks kehidupan politik di Indonesia. Ia menawarkan solusi bagi tercapainya cita-cita kolektif bangsa. Melalui sistem politik demokrasi sebagai instrumens serta penyadaran dan pemberdayaan masyarakat sipil maka bangsa ini dapat bangkit dari kemiskinan dan terwujudnya masyarakat yang adil serta sejahtera.

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kepada kehadiran Allah SWT, Dzat Penguasa segala-gala, Dzat yang menjadikan sang waktu sebagai *variable* sosial paling misterius dalam sejarah peradaban umat manusia sehingga siklus hegemoni itu tetap terjaga dan tidak ada keunggulan abadi dari satu atas yang selebihnya. Entah itu bernama pribadi, ideologi, agama ataupun yang lainnya. Salam takdzim kami haturkan kepada Muhammad SAW, Sang Nabi Penakluk Imperium Romawi dan Persia sehingga ajaran-ajaranmu mengimbak-imbak berpendaran megah keseluruh jagad raya.

Perjalanan panjang ini akhirnya sampai juga mengantarkan penulis ke penghujung studi. Sebuah fase yang tak mudah dalam kehidupan penulis selama bernaung dibawah atap UIN Sunan Kalijaga dari tahun 2004 hingga 2009. Fase yang penuh dengan gemuruh heroisme, romantika, persekawanan dan pengkhianatan sekaligus, dan sejumpat pemberontakan *ala* mahasiswa. Semua ini tentunya adalah sebuah proses yang tidak berdiri sendiri, tetapi melibatkan banyak pihak.

Karenanya pada kesempatan ini dengan penuh kerendahan hati dan segenap ketulusan jiwa, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setulus-tulusnya kepada Civitas Akademika UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yaitu:

1. Ibu Dr. Sekar Ayu Aryani, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ushuludin Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Bapak Fahrudin Faiz, S.Ag, M. Ag. Dan Dr. H. Zuhri, S.Ag, M.Ag., Selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Aqidah dan Filsafat Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak H. Shofiyullah. Mz, S.Ag, M.Ag, dan Dr. Munawar Ahmad, M.Si. yang telah membimbing dan memberi arahan serta saran yang sangat berharga dalam penulisan skripsi ini.
4. Bapak Drs. Basir Solissa, MA. Selaku Pembantu Dekan III yang telah banyak membantu memberikan pengetahuan kepada saya semasa menjabat sebagai ketua BEM-F Ushuluddin. Ia telah merelakan banyak waktu untuk menemani perdebatan dengan sahabat-sahabat LKM Ushuluddin.
5. Bapak Drs. Sudin selaku Pembimbing Akademik (PA) yang tanpa lelah memberikan arahan kepada saya.
6. Seluruh Dosen Fakultas Ushuludin yang telah bekerja keras mendidik dan mengajarkan semuanya kepada penulis.
7. Bapak pimpinan Tata Usaha beserta seluruh stafnya yang telah memberikan pelayanan kepada semua kebutuhan penulis.
8. Kepada ayahanda-ibunda tercinta (Muhabbir dan Latifah), serta Mbak (Azizah), dan Kakak Iparku (Marzuki) Segenap ketulusan, cinta, serta do'a yang telah diberikan padaku, takkan hilang dan terus berkobar. Dan untuk kedua keponakanku Alfin Maghfiroh dan Moh. Syarif Hidayat, kalian berdua telah lahir dan telah menjadi bagian dari tanggunganku.

9. Dan teruntuk *Nenk Geulis Vivi*, perempuan yang tiada lelah menemani hari-hariku. Kepadamu aku tak janjikan apapun selain hari-hari penuh perjuangan untuk menjemputmu menggapai masa depan.
10. Kepada seluruh sahabat Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Jogjakarta, terkhusus PMII Rayon Fakultas Ushuluddin.
11. Kepada sahabat-sahabatku Korp Merdeka (Angkatan 2004), kalian telah memberikan pelajaran berharga kepadaku, entah persahabatan, perselisihan, dan bahkan pengkhianatan.
12. Kepada teman-teman LKM Ushuluddin periode 2007-2009, Sahabat Qiqi SEMA-F, Lien BEM-J TH, Tijany BEM-J AF, Solia Mince BEM-Prodi SA, Agus BEM-J PA, dan teman-temanku di BEM-F yang telah banyak membantu menjalankan roda organisasi LKM Ushuluddin.
13. Kepada sahabat-sahabat seperjuangan, sahabat-sahabatku: Ja'far Shodiq, Rahmatullah, Hilal, Edwin, Cu'an, Yayak, dan untuk Sahabat Saiful Bari (Ipunk) janjiku padamu akan segera aku tuntaskan. Dan untuk sahabat-sahabat pengurus Cabang PMII DIY periode 2008-2010 serta untuk para senior Ushuluddin, Sahabat Jibril, Sahabat Kaisar, Sahabat Guntur, Sahabat Hatim, Sahabat Malik dan Sahabat Anwar, dan yang tidak mungkin penulis sebutkan semuanya.
14. dan semua pihak yang tak mungkin penulis sebutkan satu persatu, terima kasih yang tak terhingga penulis haturkan.

Dengan penuh rasa yakin penulis menyadari akan banyaknya kekurangan dan cacat dari karya ini baik dari sudut isi maupun metodologi, karenanya penulis dengan segala hormat memohon kritik, saran, dialektika, dan tegurannya. Berbagai saran dan kritik untuk perbaikan skripsi ini sangat penulis harapkan. Penulis juga memohon maaf sebesar-besarnya khusus kepada semua pihak atas kekurangan, kekhilafan, kealpaan, dan ketidakseriusan selama mengemban amanat menuntut ilmu di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Yogyakarta, 10 Juli 2009

Penyusun,

MISBAHOL MUNIR

NIM: 04511726

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
NOTA DINAS	ii
PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	
ABSTRAKSI	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xvi
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penulisan	8
D. Tinjauan Pustaka	8
E. Kerangka Teori	11
F. Metode Penelitian	15
G. Sistematika Pembahasan	17
BAB II. BIOGRAFI INTELEKTUAL HASYIM MUZADI	
A. <i>Setting</i> Sosial-Kultural Hasyim Muzadi	19
B. Latar Belakang Pemikiran Politik Hasyim Muzadi	21
C. Karier Organisasi dan Politik Hasyim Muzadi	22

D. Karya-karya Hasyim Muzadi	25
BAB III. AKAR PEMIKIRAN POLITIK DI INDONESIA	
A. Pengertian Filsafat Politik Islam	28
B. Kebangkitan Pemikiran Politik di Indonesia	30
C. Sejarah Pemikiran Politik Islam Indonesia	35
D. Tipologi Pemikiran Relasi Islam dan Negara	56
1. Perspektif Modernis	59
2. Perspektif Neo-Modernis	62
BAB IV. PEMIKIRAN POLITIK HASYIM MUZADI	
A. Ijtihad Politik Hasyim Muzadi	67
B. Komitmen Menjaga Pluralitas Kebangsaan	70
C. Demokrasi dan Sistem Politik Indonesia	82
D. Revitalisasi Politik <i>Civil Society</i>	89
BAB V. PENUTUP	
E. Kesimpulan	95
F. Saran-saran.....	96
DAFTAR PUSTAKA	98
CURRICULUM VITAE	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Relasi antara Islam dan negara, masih menjadi isu yang sangat kontroversial. Salah satu sisi perdebatan adalah adanya perbedaan yang seringkali dibuat menyangkut nilai-nilai di satu sisi dan teknik pada lain sisi. Teknik-teknik dinyatakan bersifat netral dari sudut pandang agama dan moral, yang berarti pula bisa di ambil dan diadopsi dari masyarakat Barat dengan tetap mempertahankan nilai-nilai Islam yang utuh dan tidak diselewengkan. Kenyataan yang melahirkan sikap moderasi, suatu sikap yang dilahirkan dari asumsi, bahwa tidak semua ajaran dalam politik atau demokrasi bertentangan secara diametral, melainkan ada kesejalanan dengan Islam dalam pelaksanaan yang bersifat teknis.¹

Kendati demikian, Islam sebagai salah satu agama yang terbesar pengikutnya di Indonesia juga ikut mewarnai perpolitikan. Jika ditelusuri lebih jauh persinggungan Islam dan politik tidak hanya pasca kemerdekaan saja. Melainkan, sebelum kemerdekaan diraih bahkan lebih jauh lagi pada abad ke-16 Islam telah memainkan peran penting dalam menjadikan kerajaan-kerajaan Melayu – Nusantara sebagai kerajaan Islam.²

¹ Muhammad Nur, "Islam Berbicara Tentang Cita-cita Politik Indonesia Baru" dalam *Jurnal Asy-Syir'ah*, Vol. 36, No.I, 2002, hlm. 110.

² Catatan penting tentang hubungan Islam dan politik pada masa kerajaan ini terletak pada peran Ulama dalam menyebarkan Islam. Peran ulama memiliki otoritas tidak hanya dibidang keagamaan, tapi, juga bidang sosial dan politik. Melalui pesantren yang didirikan dan kitab kuning yang ditulisnya, ulama bertindak sebagai "penterjemah" doktrin-doktrin Islam yang otoritatif, dan sekaligus sebagai "jembatan" dari proses tranmisi nilai-nilai keagamaan yang panjang. Jajat

Ketika ditarik pada persoalan politik Islam atau Islam politik justru menjadi sebuah pertanyaan besar.³ Meski, dalam lipatan – lipatan sejarah Islam tidak pernah berhenti berpolitik. Namun yang menjadi permasalahan adalah benarkan Islam memiliki tatanan konseptual tentang ketatanegaraan?

Negara dan agama memang memiliki perdebatan yang sangat panjang, namun bagaimanapun politik banyak memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap perkembangan kehidupan manusia, terlebih kaum muslim. Telah terjadi banyak *pro* dan *kontra* yang diakibatkan oleh pengaruh politik, yang lahir dari setiap generasi kaum muslim dalam melihat permasalahan politik.⁴

Kalau kita lihat beberapa tahun belakangan ini di negara Indonesia, kecenderungan untuk menegakkan negara Islam gencar diteriakkan oleh beberapa kelompok Islam ekstrimis, mengingat mereka beralasan kekuatan hukum negara yang ada saat ini telah banyak dirubah oleh oknum-oknum tertentu dan tidak lagi sesuai dengan cita-cita awal para *founding fathers* kita. Sehingga disinyalir akan mudah terjadi manipulasi dan rekayasa hukum demi melaksanakan niat-niat yang mereka anggap tidak baik.

Burhanudin dan Ahmad Baedowi, *Trasformasi Otoritas Keagamaan: Pengalaman Islam Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama dan PPIM-UIN Jakarta, 2003), hlm. 4. Menurut Clifford Geertz, peran ulama di istilahkan sebagai "Pialang Budaya" (*Cultural Broker*) antara "tradisi besar" dengan "tradisi kecil" dalam Islam. Lihat Clifford Geertz, *The Javanese Kijaji: the Changing Role of a Cultural Broker*, (New York: The Free Press, 1960), hlm 228-249

³ Hal senada juga digelisahkan oleh Bahtiar Effendy di mana ia menyatakan bahwa wacana politik kemerdekaan telah mewariskan kebingungan tertentu, khususnya dalam hal pemahaman politik Islam. Lihat Bahtiar Efendy, *Repolitikasi Islam*, (Bandung: Mizan, 2000), hlm. 196.

⁴ Pendapat ini sebenarnya lebih mengarah pada bentuk relasi negara dan agama Islam dalam melihat setiap perkembangan yang terjadi dalam dunia politik, yang kemudian menjadi sumber perbedaan ummat Islam dalam melihat dan bersikap politis terhadap permasalahan negara dalam kaitannya dengan peran agama. lihat, Maftuh Abegebriel dkk, *Negara Tuhan; The Thematic Encyclopaedia* (Yogyakarta; SR-Ins, 2004), hlm. 2

Di samping umat Islam menjadi mayoritas di negara Indonesia, sehingga mereka berkeyakinan bahwa hanya dengan negara yang berkepemimpinan *Khilafah*-lah⁵ dan hukum yang berlandaskan *Syari'at Islam*-lah yang sanggup memberikan kesejahteraan yang sesungguhnya bagi negara Indonesia,⁶ dibandingkan dengan hukum-hukum yang sebelumnya ada dan hanya menjadi alat legitimasi para elit politik dalam mempertahankan kekuasaannya.

Hal seperti ini terasa tidaklah asing lagi bagi kita, jika melihat fenomena yang terjadi hingga saat ini, yaitu dengan maraknya kampanye yang mereka lakukan dalam bentuk aksi maupun melalui media, dengan menyuarakan pandangan mereka terhadap isu-isu yang sedang aktual dengan menyisipkan isu-isu yang meneriakkan berdirinya negara Islam sebagai solusi terakhir. Ditambah dengan makin menghangatnya permasalahan *terorisme* dengan perdebatannya, yang dari tahun ketahun makin menemukan tempatnya dalam peta konstelasi politik Nasional maupun Internasional.

Pro kontra terhadap berdirinya negara Islam dan sosok *Khilafah* yang dianggap menjadi solusi bagi carut-marutnya konstelasi politik di negara kita ini sejak beberapa tahun terakhir menghantui kita semua. Tidak dipungkiri pula bahwa sistem politik negara kita juga masih dipertanyakan. Parahnya lagi

⁵ Isu sistem *Khilafah* (*Pan-Islamisme*) cukup menguat bahkan tidak hanya di level nasional melainkan juga di Internasional. Di Indonesia isu tentang *Khilafah* menguat sejak runtuhnya Orde Baru. Pada dasarnya gerakan islamisme atau fundamentalisme ini berupaya melakukan revitalisasi Islam dalam semua aspek kehidupan masyarakat. Lihat, Ali Maschan Moesa, *Nasionalisme Kiai: Konstruksi Sosial Berbasis Agama*, (Yogyakarta: LKiS dan IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2007), hlm. 74

⁶ Muhammad Azhar, *Filsafat Politik; Perbandingan Antara Islam dan Barat* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1996), hlm. 5

beberapa kelompok ekstrimis Islam menyatakan bahwa demokrasi sudah tidak sesuai dan harus diganti dengan sistem *Khilafah*.

Bagi banyak kalangan cendekiawan muslim pemaknaan Islam sebagai agama yang *Rahmatan lil Alamin* adalah sebuah pengetahuan yang bersifat spiritual, menegaskan bahwa Islam adalah agama yang mengatur kehidupan manusia tidak hanya dengan sang *Khalik*, namun juga mengatur hubungan antar manusia baik secara sosial, budaya, politik, ekonomi dan sebagainya. Namun perbedaan pandangan dalam melihat setiap permasalahan keagamaan menjadikan Islam terkadang salah dipahami oleh ummatnya, semisal "*Inna Al-Islam Din wa Daulah*"⁷ (sesungguhnya Islam itu adalah agama dan negara) telah banyak dipahami oleh sebagian kaum muslim sebagai sebuah teologi politik yang kaku, sehingga pemaknaan Islam terkesan literlek dan buta, yang kemudian secara formalistik-legalistik *negara Islam* menjadi jawaban dalam setiap kebijakan-kebijakan yang bersifat politis.⁸ Namun apakah kemudian hal di atas dapat dibenarkan, bagaimanakah dengan nilai-nilai politik dalam Islam?

Dalam perkembangannya, Islam dan negara ternyata sangat panjang dan mengesankan. Meskipun pada medio abad ke-19 kata demokrasi benar-benar dianggap penting dan bernilai positif oleh negara-negara yang mayoritas beragama Islam. Nilai-nilai yang terkandung dalam Islam sebenarnya secara

⁷ Deliar Noer, *Pengantar ke Pemikiran Politik*, (Medan: Dwipa, 1965), hlm. 41. Sejumlah pengertian negara dapat pula dibaca dalam ilmu Kencana Syafi'i, *Al-Qur'an dan Ilmu Politik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), hlm. 141-144.

⁸ Gagasan politik Islam seperti itulah, yang semenjak awal Islam dirujuk oleh banyak organisasi Islam. Lihat Maftuh Abegebriel dkk, *Negara Tuhan; The Thematic Encyclopaedia* (Yogyakarta; SR-Ins, 2004), hlm. 6

substantif juga mencerminkan penghargaan yang tinggi terhadap pengakuan Hak Asasi Manusia (HAM), aspirasi rakyat, kebebasan berkelompok yang menjadi nilai pokok dalam perjuangan politik negara bangsa.⁹ Kiranya negara Islam tidak selamanya mengasumsikan tidak demokratis dan kaku, karena bagaimanapun nilai-nilai humanisme dan pengakuan hak asasi manusia di dalam Islam memiliki tempat yang paling utama.

Dalam sejarah perkembangannya Islam dan politik menemukan bentuk perjumpaan yang mengesankan dan telah terjalin dalam waktu yang sangat panjang. Sehingga tidak berlebihan bila Bahtiar Effendy berpendapat bahwa Islam tidak bisa dipisahkan dari politik.¹⁰

Filsafat Politik merupakan sebuah kajian yang tidak akan pernah usang untuk terus dikaji dan ditelaah. Perubahan iklim setiap sejarah politik di belahan dunia manapun, akan selalu memberikan inspirasi baru bagi peminat maupun pemerhati filsafat politik untuk terus mengkaji pendapat-pendapat sementara tentang filsafat politik menuju pendapat yang lebih strategis. Terlebih ketika filsafat politik dikaji dari ruang yang lebih spesifik lagi, semisal ekonomi, sosial, pendidikan dan agama. Ini menjadikan setiap kajian filsafat politik semakin menarik. Dan kalau sampai saat ini kita sebagai pengkaji filsafat masih berkeyakinan bahwa peranan filsafat dalam melihat dan memetakan setiap

⁹ Jalaluddin Rahmat menyebutkan, bahwa barat lebih menekankan sentimen *miring* dari setiap respon umat Islam terhadap demokrasi, yaitu pada hal yang lebih negatif, ini ditegaskan dengan menstretotipkan negara-negara Islam masuk dalam kategori antidemokrasi, lihat pengantar dari buku Yamani. *Antara Al-Farabi dan Khomeini; Filsafat Politik Islam*. (Bandung: Mizan, 2002), hlm. 20.

¹⁰ Bahtiar Efendy, *Repolitisasi Islam*, hlm. 195

permasalahan pengetahuan adalah yang paling mendasar, atau untuk sekedar mendapatkan landasan filosofis adalah merupakan kuncinya. Maka kajian terhadap filsafat politik adalah merupakan studi yang perlu dipertimbangkan. Termasuk dalam hal ini permasalahan yang akan dibahas dalam proposal pengajuan skripsi ini.

Beragamnya pendapat para pengkaji politik tentang konsep dasar negara dari teori politiknya menjadi pertanyaan besar. Mengingat sejarah politik banyak menyisakan pertanyaan etis. Sejak akademi Plato sampai institusi pendidikan besar masa kini studi politik mendapat sambutan hangat.¹¹

Penulis ingin melihat persoalan politik dan nilai-nilai kebangsaan yang saat ini dijadikan sebagai landasan untuk melihat persoalan politik Indonesia ke arah yang lebih filosofis. Artinya landasan teoritis apakah yang kemudian dijadikan dasar gerakan politiknya? Dan bagaimana sebenarnya pemahaman politik ulama itu sendiri?

Sebelum dibahas lebih jauh, penulis ingin menegaskan bahwa akan sangat merepotkan, ketika penulis harus melihat persoalan politik pada tema-tema besar seperti di atas. Maka penulis mengambil alternatif kajian melalui studi pemikiran tokoh yang memiliki basis historis dalam dunia politik khususnya di Indonesia, baik secara intelektual maupun pengaruhnya dalam perkembangan politik kebangsaan. Oleh karena itu, penulis memilih seorang tokoh yang bernama Hasyim Muzadi. Ia merupakan seorang ulama dan pemikir yang juga memiliki konsern terhadap persoalan sosial politik bangsa.

¹¹ Henry J. Schmandt, *Filsafat Politik; Kajian Historis Zaman Yunani Kuno Sampai Zaman Modern*, (Jogjakarta: Pustaka Pelajar, 2002), hlm. v

Sebagaimana penjelasan di atas, ulama sebagai pialang budaya bertindak sebagai "penterjemah" doktrin-doktrin Islam yang otoritatif, dan sekaligus sebagai "jembatan" dari proses transmisi nilai-nilai keagamaan yang panjang.¹² Hasyim Muzadi sebagai Ulama dan intelektual sekaligus tokoh pemangku jabatan tertinggi di NU yang banyak memiliki gagasan brilian dibidang politik patut untuk dikaji. Hal ini bisa dimafhumi tidak semata-mata karena beliau inten dalam pergulatan di pentas politik nasional dan memimpin salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia yaitu PBNU, tetapi juga karena proses panjang beliau dalam pergulatan intelektual serta sangat produktif dalam menelorkan gagasan-gagasan baru. Sebagai ulama yang secara ideologis-kultural berasal dari lingkungan Nahdliyyin, maka sangat wajar apabila pemikirannya banyak dipengaruhi oleh ulama-ulama NU sebelumnya, semisal, KH. Hasyim Asy'ari, KH. Bisri Syansuri, KH. As'ad Syamsul Arifin, dan KH. Wahab Hasbullah dan ulama-ulama besar lainnya.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah di atas, nampak bahwa studi pemikiran Hasyim Muzadi, terutama konsepsi tentang politik merupakan kajian yang sangat menarik untuk ditelaah secara serius dan mendalam. Politik tentu tidak dapat dipisahkan dari pemikiran Hasyim Muzadi. Politik merupakan kesatuan pemikiran yang tidak dapat dipisahkan dari konsep ajaran Islam, dan ide-ide kebangsaan. Pemikiran-pemikiran Hasyim Muzadi yang lain hanya akan disinggung sejauh mendukung alur pembahasan.

¹² Jajat Burhanudin dan Ahmad Baedowi, *Trasformasi Otoritas Keagamaan: Pengalaman Islam Indonesia*, hlm. 4

Secara lebih rinci, permasalahan yang akan dikaji dalam studi ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pemikiran politik Hasyim Muzadi dalam konteks perpolitikan kontemporer di Indonesia?
2. Bagaimana ijtihad politik Hasyim Muzadi dalam menggabungkan ajaran Islam dan ide-ide kebangsaan?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penulisan

Sudah menjadi sebuah keharusan bagi setiap penulis dalam mengemukakan tujuan dari penulisan setiap karyanya. Maka oleh karena itu, penulisan skripsi ini memiliki tujuan:

1. Menjelaskan tentang konsep pemikiran politik Hasyim Muzadi.
2. Menjelaskan konsepsi Hasyim Muzadi tentang ijtihad politik dan relevansinya dalam konstelasi politik di Indonesia.

Sedangkan kegunaan penelitian ini adalah:

1. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan penulis dan pembaca tentang konsep pemikiran ijtihad politik Hasyim Muzadi.
2. Sumbangan ilmiah bagi perkembangan konsepsi politik di Indonesia.

D. Tinjauan Pustaka

Untuk membuktikan orisinalitas karya tulis ilmiah ini, maka penulis akan menunjukkan sejumlah karya tulis ilmiah yang telah membahas ijtihad politik. Selain itu, penulis juga akan menunjukkan sejumlah karya tulis ilmiah lainnya

yang menguraikan tentang ijtihad dan konsep pemikiran Hasyim Muzadi. Beberapa karya tulis ilmiah tersebut ada yang berbentuk buku, jurnal, majalah, skripsi, dan lain-lain.

Adapun karya tulis ilmiah yang berbentuk buku adalah sebagai berikut:

1. Buku *NU & Ijtihad Politik Kenegaraannya* karya M. Masyhur Amin (Al-Amin Press, 1996). Buku ini khususnya menyajikan pembahasan tentang dinamika politik NU dalam lintasan sejarah politik Indonesia. Masyhur Amin tidak hanya menjelaskan tentang peristiwa – peristiwa politik yang terjadi di NU, ia juga menjelaskan tentang perkembangan pemikiran politiknya. Jauh lebih dari itu ia juga memaparkan tentang proses ijtihad dalam momentum politik kebangsaan.

2. Buku berjudul *Ijtihad Politik Ulama: Sejarah NU 1952-1967* (2003) karya Greg Fealy yang judul aslinya *Ulama and Politics in Indnesia a History of Nahdlatul Ulama 1952-1967*. Karya ini secara detail memaparkan tentang perjalanan NU dalam dinamika politik selama lima belas tahun. Lebih jauh lagi Greg Fealy menjelaskan tentang dinamisme perpolitikan dalam tubuh NU. Selain itu karya ini menjelaskan pertarungan NU dalam arena politik praktis dan peran politik NU pada saat kondisi ekonomi-politik nasional yang sedang bergejolak.

3. Buku *Ijtihad Politik Cendikiawan Muslim*, karya Ach. Muflih Saefudin. Buku ini memaparkan tentang ijtihad para cendikiawan muslim dalam politik. Karya ini menjelaskan tentang pemikiran cendikiawan muslim dalam memandang politik. Ijtihad politik di sini merupakan usaha keras cendikiawan muslim dalam menemukan benang merah antara politik dan Islam.

4. Buku *Ijtihad Kontemporer Kode Etik dan Berbagai Penyimpangan* dengan judul aslinya *Al-Ijtihad Al-mu'ashir baina Al-Inzhibaath wa Al-Infiraath* (1994) adalah karya Yusuf Qardhawi. Buku ini menjelaskan pro dan kontra tentang aktivitas ijtihad di era kontemporer. Lebih dari itu, karya ini juga dapat dikatakan sebagai rekonstruksi akan konstruk ijtihad yang dianut oleh para mujtahid. Selain menjelaskan tentang kode etik ijtihad kontemporer, Yusuf Qardhawi juga dalam buku ini mencoba menempatkan ijtihad tetap dalam porsi yang sebenarnya.

5. Buku *Ijtihad Kemanusiaan* (2005) yang di karang oleh Jaih Mubarak. Buku ini merupakan suatu pandangan tentang ijtihad di Indonesia yang ditinjau dari berbagai segi. Buku ini juga memaparkan akan peran penting dan sepak terjang ijtihad di negeri yang mayoritas beragama Islam. Selain itu, Jaih Mubarak memberikan sebuah contoh kasuitik tentang ijtihad kemanusiaan yang terjadi di Indonesia, seperti Hak Azasi Manusia (HAM), Keluarga Berencana (KB), dan pelanggaran hak cipta, dan lain sebagainya.

6. Buku *Ijtihad Islam Liberal: Upaya Merumuskan Keberagamaan yang Dinamis* (2005) yang disunting oleh Moqsith Ghazali. Buku ini merupakan kumpulan tulisan dari berbagai kalangan yang ingin menegaskan tentang ajaran Islam yang dinamis. Di mana Islam yang dinamis sebenarnya terletak pada kerja Ijtihad itu sendiri. Ijtihad adalah ruh untuk menghidupkan Islam secara terus menerus. Maka, ijtihad tidak boleh berhenti dalam mengupayakan jalan keluar dari problem kemanusiaan yang kompleks. Buku ini juga ingin menegaskan kembali dimensi liberal atau kebebasan dalam Islam yang jangkarnya adalah

"niat" atau dorongan emotif-subyektif dalam manusia. Tak lebih buku ini ingin memulihkan kembali integritas wahyu dengan mengembalikan dimensi kebebasan manusia, dan menempatkan manusia pada fokus penghayatan keagamaan.

Selain karya tulis yang berbentuk buku masih ada karya tulis ilmiah berbentuk skripsi yang perlu disajikan dalam skripsi ini yaitu: Muhammad Zamzami yang menulis skripsi dengan judul *Pandangan Hasyim Muzadi tentang Pluralisme di Indonesia* (2007). Di sini Zamzami mengurai konsep pluralisme dengan sudut pandang agama. Ia menyebutkan dalam analisisnya bahwa perbedaan dalam berkeyakinan merupakan khazanah realitas sosial.

Berdasarkan uraian di atas, penulis kemudian berkesimpulan bahwa skripsi yang berjudul *Ijtihad Politik Hasyim Muzadi: Studi Pemikiran Politik* ini masih orisinal, karena penelitian yang mencoba mengkaji konsep pemikiran Hasyim Muzadi dari perspektif filsafat politik belum pernah ditulis sebelumnya. Karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini.

E. Kerangka Teoritik

Sebagai studi yang memfokuskan pada kajian pemikiran politik tentang hubungan negara agama, maka sangat perlu untuk penulis paparkan tentang kerangka teori dari penelitian ini. Namun, perlu dicatat bahwa dalam studi ini peneliti tidak bermaksud memberikan konsep-konsep yang bersifat spesifik. Mengingat karena rumit dan luasnya konsep-konsep yang berkenaan dengan studi pemikiran politik, pemberian konsep-konsep secara spesifik, juga dikhawatirkan justru hanya akan menciptakan distorsi. Karenanya konsep-konsep yang penulis

paparkan berikut ini tidak lebih hanya sekedar sebagai tambahan *public discourse*. Banyak tokoh yang memiliki sudut pandang berbeda tentang konsep-konsep agama dan negara.

Konsep negara menurut Miriam Budiarjo mendefinisikan negara sebagai suatu daerah teritorial yang rakyatnya diperintah oleh sejumlah pejabat dan yang berhasil menuntut para warga negaranya taat kepada peraturan perundang-undangan melalui penguasaan (*control*) monopolitis dari kekuasaan yang sah.¹³ Untuk mengatur pola hubungan itu, yakni pejabat dan rakyat, diperlukan sistem politik yang disepakati bersama. Sistem politik, menurut Dahl dapat didefinisikan sebagai setiap pola hubungan manusia yang kokoh dan melibatkan – secara cukup menonjol-kendali, pengaruh, kekuasaan dan kewenangan.¹⁴ Sistem politik yang diyakini dapat membawa negara dan rakyatnya kepada keadaan yang lebih baik adalah demokrasi.¹⁵

Adapun agama didefinisikan Mahmud Syaltut sebagai ketetapan-ketetapan Ilahi yang diwahyukan kepada Nabi-Nya untuk menjadi pedoman hidup manusia.¹⁶ Secara sosiologis Emile Durkheim mendefinisikan agama sebagai

¹³ Miriam Budiarjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia, 2000), hlm. 40.

¹⁴ Robert A. Dahl, *Analisis Politik Modern*, alih bahasa Mustafa Kamil Ridwan, (Jakarta: Bumi Aksara, 1994), hlm. 4

¹⁵ Robert A. Dahl, *Perihal Demokrasi: Menjelajahi Teori dan Praktek Demokrasi secara Singkat*, alih bahasa A.Rahman Zaenudin, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2001), hlm. 53.

¹⁶ Sementara itu Syaikh Muhammad Abdullah Badran mendefinisikannya secara kebahasaan. *Din* yang biasanya diterjemahkan “agama”, menurut Guru Besar Al-Azhar itu, menggambarkan hubungan antara dua pihak di mana yang pertama mempunyai kedudukan lebih tinggi daripada yang kedua. Jadi agama adalah hubungan makhluk dan *Khaliq*-nya yang mewujud dalam sikap batinnya serta tampak dalam ibadah yang dilakukannya dan tercermin pula dalam sikap kesehariannya. Lihat M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an, Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, (Bandung: Mizan, 2002), hlm. 209-210.

sebuah sistem kepercayaan dan ritual yang berkaitan dengan yang suci (*the secret*) dan ia berfungsi mengikat masyarakat bersama-sama dalam kelompok-kelompok.¹⁷ Jadi, secara teologis, Islam dapat diartikan sebagai sistem nilai dan ajaran yang bersifat Ilahiah dan karena itu sekaligus bersifat transenden. Tetapi dari sudut sosiologis, ia merupakan fenomena peradaban, kultural dan realitas sosial dalam kehidupan manusia.¹⁸

Oleh Karena itu, kemunculan ungkapan *al-islâm dîn wa daulah* (Islam adalah agama dan negara) yang mengisyaratkan kekuatan agama dan negara adalah hal yang wajar, meski bersifat problematis. Dalam upaya menjawab masalah ini beberapa pengamat politik Islam cenderung untuk melihatnya secara “monolitik”, karena tunduk kepada sebuah paradigma bahwa hubungan antara Islam dan politik pada hakikatnya bersifat “organik”. Akhirnya, mereka memandang Islam sebagai sesuatu yang sejak awalnya merupakan agama politik.¹⁹ Kelemahan paradigma ini adalah tidak mempertimbangkan kenyataan bahwa Islam adalah sebuah agama yang multi-interpretatif, yang membuka kemungkinan banyak penafsiran mengenainya (*a polyinterpretable religion*). Oleh

¹⁷ Dikutip oleh Dawam Raharjo, “Agama, Islam dan Negara” dalam Mukti Ali dkk., *Agama dalam Pergumulan Masyarakat Kontemporer*, Imron Rasyidi (ed.), (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1998), hlm. 13.

¹⁸ Azyumardi Azra, *Pergolakan Politik Islam, dari Fundamentalisme, Modernisme hingga Post-Modernisme*, (Jakarta: Paramadina, 1996), hlm. i

¹⁹ Bahtiar Effendy, *Islam dan Negara, Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Umat Islam di Indonesia*, (Jakarta: Paramadina, 1998), hlm. 4.

karena itu, politik Islam tidak bisa dilepaskan dari sejarah Islam yang multi-interpretatif semacam ini.²⁰

Ketika agama dihubungkan dengan negara telah memunculkan beberapa kecenderungan. Secara garis besar hubungan agama dan negara bisa dibedakan menjadi tiga model. *Pertama* model negatif, yaitu agama bertentangan dengan negara. Sebagaimana pandangan Ziauddin Sardar bahwa Islam secara *inhern* merupakan sebuah keyakinan dan pandangan-dunia universal yang tidak mengakui batasan-batasan geografis.²¹ Secara harfiah negara berarti kekuasaan yang dibatasi oleh teritori dan geografis. Sedangkan doktrin Islam mengatakan bahwa hanyalah Tuhan yang memiliki kekuasaan.²²

Model *kedua* hubungan agama dan negara adalah bersifat netral, dimana urusan agama dan urusan negara berjalan sendiri-sendiri. Teori pemisahan agama dan politik ini populer dengan istilah sekulerisasi politik.²³ Berlawanan dengan model pertama dan kedua, yang *ketiga* bersifat positif, yakni berpandangan bahwa agama, baik secara sosiologis maupun teologis, sangat mendukung proses demokratisasi politik, ekonomi, maupun kebudayaan. Meskipun agama tidak

²⁰ Bahtiar Effendy, *Islam dan Negara, Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Umat Islam di Indonesia*, (Jakarta: Paramadina, 1998), hlm.11.

²¹ Ziauddin Sardar, *Kembali ke Masa Depan: Syariat Sebagai Metodologi Pemecahan Masalah*, (Jakarta: Serambi, 2005), hlm. 132.

²² Komaruddin Hidayat, "Tiga Model Hubungan Agama dan Demokrasi", dalam Elza Peldi Taher (ed.), *Demokratisasi Politik, Ekonomi dan Budaya, Pengalaman Indonesia Masa Orde Baru*, (Jakarta: Paramadina, 1994), hlm. 189-192.

²³ Teori ini ternyata memiliki banyak nuansa. Sekulerisasi bisa berlangsung hanya pada level formal kelembagaan, bisa terjadi pada proses sosial, dan bisa juga pada level kesadaran metafisis. Dan bisa jadi ketiganya berlangsung sekaligus. Lihat, Komaruddin Hidayat, "Tiga Model Hubungan Agama dan Demokrasi", dalam Elza Peldi Taher (ed.), *Demokratisasi Politik, Ekonomi dan Budaya, Pengalaman Indonesia Masa Orde Baru*, hlm. 192-193.

secara sistemis mengajarkan praktik demokrasi, namun agama memberikan etos, spirit dan muatan doktrinal yang mendorong bagi terwujudnya kehidupan demokratis.²⁴

F. Metode Penelitian

Penelitian ini dapat disebut sebagai penelitian filsafat karena yang menjadi objek kajian dalam penelitian ini adalah merupakan produk pemikiran. Dalam penelitian filsafat yang akan dicari adalah ide-ide dasar (*fundamental ideas*) dari pemikir. Begitu juga dalam kajian filsafat dapat dicari benang merah kesinambungan dengan pemikiran terdahulu atau sezamannya karena selalu terjadi dialog dengan sejarahnya.²⁵

Penelitian ini bersifat kepustakaan (*library research*) dalam artian bahwa data-data yang mendukung kajian ini berasal dari sumber-sumber kepustakaan baik berupa buku-buku, ensiklopedi, kamus, majalah, maupun jurnal yang dipandang ada relevansinya dengan tema penulisan. Data-data tersebut disebut literatur.²⁶

²⁴ Dalam Islam, misalnya, sejak Muhammad Rasulullah memulai dakwahnya berupa *tauhid* (tidak ada objek pujaan yang diidolakan kecuali Allah), maka implikasi sosiologis dari ajaran *tauhid* ini adalah munculnya gerakan egaliterianisme, dalam masyarakat Arab yang feodalistik. Meskipun agama itu berasal dari Tuhan, kata pendukung ini, tetapi pada pelaksanaannya melibatkan manusia. Lihat, Komaruddin Hidayat, "Tiga Model Hubungan Agama dan Demokrasi", dalam Elza Peldi Taher (ed.), *Demokratisasi Politik, Ekonomi dan Budaya, Pengalaman Indonesia Masa Orde Baru*, hlm. 195-196.

²⁵ K. Bertens, *Filsafat Barat Abad XX* (Jakarta: Gramedia, 1983), jilid I, hlm. 1.

²⁶ Sutrisno Hadi, *Metode Research* (Yogyakarta, Fakultas Psikologi UGM, 1987) hlm. 67.

1. Objek penelitian

Objek material yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah Filsafat Politik, sedangkan objek formal dalam penelitian ini adalah pemikiran politik Hasyim Muzadi.

2. Sumber data

Sumber data penelitian ini terdiri dari sumber data *primer* dan sumber data *sekunder*. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah karya-karya Hasyim Muzadi. Karya-karya tersebut yaitu; *Membangun NU Pasca Gus Dur*, *Menyembunyikan Luka NU*, *Nahdlatul Ulama di Tengah Agenda Persoalan Bangsa*, dan *Agenda Strategis Pemulihan Martabat Bangsa*, serta karya-karya lainnya sejauh mendukung pokok bahasan. Adapun sumber data sekunder terdiri dari buku-buku, kamus, tulisan atau karya tulis, opini yang terdapat dalam jurnal, majalah, koran atau karya tulis lainnya yang terkait dengan tema tulisan ini. Dengan demikian sumber-sumber sekunder tersebut dapat melengkapi analisis skripsi ini.²⁷

Setelah data terkumpul, penulis mengolah data-data tersebut dan mengklasifikasikannya sesuai pokok kajian. Untuk mendukung langkah-langkah tersebut maka digunakan metode deskriptif-analisis, yaitu menurutkan dan menafsirkan data yang telah terkumpul, menganalisis suatu objek dengan memilah-milah antara satu pengertian lain untuk mendapatkan kejelasan suatu

²⁷ Winarko Surakhman, *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar Metode Teknik* (Bandung: Tarsito, 1990), hlm. 182. lihat juga, Anton Baker dan Achmad Charris Zubair, *Metodologi Penelitian Filsafat*, (Yogyakarta: Kanisius, 1990), cet. Ke-1, hlm. 61-65.

masalah.²⁸ Metode ini berguna untuk menghindari kerancuan konsep yang dibangun tokoh sehingga penulis dapat menangkap gagasan secara akurat.

Penulisan ini membahas ide-ide yang muncul di masa lampau, yang lahir melalui proses pergulatan panjang. Karena itu pula penulisan ini menggunakan pendekatan historis-filosofis, yaitu suatu proses pendekatan terhadap masalah yang meliputi pengumpulan dan interpretasi atau menafsirkan suatu masalah dan gagasan yang muncul di masa lampau. Sementara dengan metode filosofis diharapkan dapat menjernihkan pemahaman ilmiah yang telah ada dengan lebih baik dan lengkap serta dapat memberikan pengarahannya untuk menyusun pemahaman ilmiah yang lebih menyeluruh dan tepat.²⁹

G. Sistematika Pembahasan

Bab I merupakan pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah, pembatasan dan perumusan masalah, tujuan, kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan dalam skripsi.

Bab II membahas tentang biografi Hasyim Muzadi dan karya-karyanya. Hal ini mencakup riwayat hidup dan pendidikan Hasyim Muzadi, latar belakang pemikiran, karya-karya dan karir politik Hasyim Muzadi serta tokoh-tokoh yang mempengaruhinya.

Bab III akan difokuskan pada perkembangan politik Islam kontemporer dan akar sejarah politik di Indonesia.

²⁸ Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 59.

²⁹ Anton Baker dan Achmad Charris Zubair, *Metodologi Penelitian Filsafat*, hlm. 115.

Bab IV merupakan pembahasan pokok pemikiran dari penelitian ini. Dalam bab ini akan dijelaskan pemikiran dan eksperimentasi politik Hasyim Muzadi tentang ijihad politik meliputi spirit perjuang politik santri dan ulama, ide-ide kebangsaan, serta relevansi politik dalam konteks kehidupan politik kontemporer di Indonesia.

Diakhiri bab V yaitu penutup yang berisikan kesimpulan atas analisa dari keseluruhan penjelasan dari bab-bab di atas. Yang berisikan penegasan dari hasil analisa. Serta berisikan saran-saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian terhadap pemikiran politik Hasyim Muzadi yang mengambil titik tekan pada ijtihad politiknya dalam menggabungkan ajaran Islam dan ide – ide kebangsaan, serta konstelasi pemikirannya dalam konteks perpolitikan Indonesia maka secara keseluruhan dapat disimpulkan beberapa hal, yaitu:

Hasyim Muzadi menyimpulkan bahwa ajaran Islam dan ide-ide kebangsaan memiliki keterkaitan antara satu sama lain. Di mana Islam memberikan ruang dan menganjurkan bagi terbentuknya masyarakat ideal. Yakni, sebuah tatanan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Hal tersebut sejalan dengan cita-cita dan ide-ide kebangsaan sebagaimana termaktub dalam Undang Undang Dasar (UUD) 1945.

Dalam konteks kebangsaan Islam sama sekali tidak membenarkan sikap dan tindakan yang dapat merendahkan prinsip keadilan bagi seluruh warga negara. Dalam bingkai kebangsaan, setiap warga negara harus diperlakukan secara adil tanpa memandang asal suku, ras, maupun agamanya. Islam juga mengajarkan semangat persaudaraan yang dapat mengantar masyarakat menuju keharmonisan dan kebersamaan hidup dalam perbedaan.

Islam juga menginginkan terwujudnya ko-eksistensi umat islam dan umat pemeluk agama lain dalam sebuah komunitas yang diikat oleh kesatuan identitas sebagai bangsa, yang dikenal dengan konsep *ukhuwah wathaniyah* (persaudaraan

bangsa). Selain itu Islam juga menjunjung tinggi rasa solidaritas sesama umat manusia yang beradab, Islam senantiasa mendorong terbentuknya *ukhuwah basyariyah* (persaudaraan manusia) yang melampaui sekat-sekat etnis, suku dan ras.

Sedangkan konteks pemikiran politik Hasyim Muzadi dalam perpolitikan Indonesia masih sesuai dengan kebutuhan bangsa saat ini. Maka selayaknya kita apresiasi sebab pemikiran ini menawarkan solusi bagi tercapainya cita-cita kolektif bangsa. Melalui sistem politik demokrasi sebagai instrumens serta penyadaran dan pemberdayaan masyarakat sipil maka bangsa ini dapat bangkit dan sejahtera.

B. Saran – saran

Sebagai sebuah ijtihad politik, gagasan politik Hasyim Muzadi layak untuk diapresiasi dengan serius. Sebagai sebuah pemikiran, ia berusaha menawarkan sebuah alternatif bagi kebangkrutan sistem politik bangsa. seperti apapun bentuknya, sangat tidak adil rasanya jika kita secara ceroboh menghakiminya. Pemikiran politik ini memiliki arti yang sangat penting tidak hanya bagi aktivis politik, akan tetapi juga bagi kaum intelektual, pengkaji ilmu politik, dan khalayak umum.

Hasil penelitian ini masih jauh dari kata memadai untuk mengurai gagasan politik Hasyim Muzadi secara utuh dan komprehensif, oleh karenanya penulis anjurkan kepada peneliti yang lain untuk terus melakukan kajian dan telaah yang lebih mendalam, sistematis, kritis, dan komprehensif. Kepada para peneliti dan

pengkaji yang ingin melanjutkan penelitian ini dalam bidang pemikiran politik Hasyim Muzadi hendaknya menggunakan perspektif yang beragam untuk memperkaya wacana.

Dan bagi pembaca khalayak yang ingin tahu lebih jauh tentang ijihad politik Hasyim Muzadi, supaya tidak terjebak pada pemahaman yang salah dan dikotomis maka hendaknya untuk melakukan pembacaan yang seimbang dan proporsional.

DAFTAR PUSTAKA

Kelompok Buku

- Abdurrahman, Moslem., *Islam Transformatif*, cet. ke-2, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995
- Abegebriel, Maftuh (dkk). *Negara Tuhan; The Thematic Encyclopaedia*. Yogyakarta; SR-Ins, 2004.
- Al-Brebesy, Ma'mun Murod., *Menyingkap Pemikiran Politik Gus Dur dan Amin Rais tentang Negara*, Jakarta: Rajawali Pers, 1999.
- Assyaukanie, Luthfi (ed.), *Wajah Liberal Islam di Indonesia*, Jakarta: Jaringan Islam Liberal, 2002.
- Azhar, Muhammad. *Filsafat Politik; Perbandingan Antara Islam dan Barat*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1996.
- Ali, Zaenal., *100 Orang Indonesia Paling Berpengaruh*, Jakarta: Narasi, 2008.
- An-Nabhani, Taqiyuddin., *Sistem Pemerintahan dan Realitas Doktrin, Sejarah dan Doktrin, Sejarah Empirik*, alih bahasa Moh. Magfur Wachid, Bangil: Al-Izzah, 1996.
- Andreson, Ben., *Revolusi Pemoeda*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1988.
- Anshary, Endang Saefuddin., *Piagam Jakarta 22 Juni 1945 dan Sejarah Konsensus Nasional antara Nasionalis Islami dan Nasionalis Sekuler, tentang Dasar Negara Republik Indonesia 1949-1959*, Bandung: Pustaka Salman, 1981.
- Ayubi, Nazib., *Political Islam*, London: Routledge, 1991.
- Azhar, M., *Filsafat Politik Perbandingan Antara Islam dan Barat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.
- Boland, B.J., *The Struggle of Islam in Modern Indonesia*, The Hague: Martinus Nijhoff, 1971 dan 1982
- Baker, Anton dan A. Charis Zubair. *Metodologi Penelitian Filsafat*. Yogyakarta: Kanisius, 1990.
- Burhanudin, Jajat dan Ahmad Baedowi, *Trasformasi Otoritas Keagamaan: Pengalaman Islam Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama dan PPIM-UIN Jakarat, 2003

- Diamond, Larry., *Developing Democracy: Toward Consolidation*, Jogjakarta: IRE Press, 2003.
- Dhakidae, Daniel., *Cendekiawan dan Kekuasaan: dalam Kekuasaan Orde Baru*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003.
- Enayat, Hamid., alih bahasa Asep Hikmat, *Reaksi Politik Sunni dan Syi'ah: Pemikiran Politik Islam Modern Menghadapi Abad ke 20*, Bandung: Pustaka, 1998.
- Effendi, Djohan., *The contribution of the Islamic Parties to the Decline of Democracy in the 1950s*, makalah Confrence on Indonesia Democracy, Monash University, 18 Desember 1992.
- Efendy, Bahtiar., *Repolitisasi Islam*. Bandung: Mizan, 2000.
- _____ dan Fachry Ali., *Merambah Jalan Baru Islam*, Bandung: Mizan, 1986
- Fealy, Greg., *Ijtihad Politik Ulama, Sejarah NU 1952-1967*, Yogyakarta: LKiS, 2003.
- Furchan, Arief dan Agus Maimun. *Studi Tokoh: Metode Penelitian Mengenai Tokoh*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Feith, Herbert dan Lance Castles., *Pemikiran Politik Indonesia 1945-1965*, Jakarta: LP3ES, 1988.
- Geertz, Clifford. *The Javanese Kijaji: the Changing Role of a Cultural Broker*. New York: The Free Press, 1960.
- Ghazali, Abd Moqsith., *Ijtihad Islam Liberal: Upaya Merumuskan Keberagaman yang Dinamis*, Jakarta: JIL, 2005.
- Hadi, Sutrisno. *Metode Research*. Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1987.
- Hermawan, Eman., *Politik Membela Yang Benar: Teori, Kritik dan Nalar*, Jogjakarta: KLiK R, 2001.
- Hatta, *Memoir*, Jakarta: Tintamas, 1978.
- Hidayat, Komaruddin dan Ahmad Gaus AF (ed.), *Islam, Negara dan Civil Society: Gerakan dan Pemikiran Islam Kontemporer*, Jakarta: Paramadina, 2005.
- Hikam, Muhammad AS., *Demokrasi dan Civil Society*, Jakarta: LP3ES, 1996.

- _____.dkk., *Wacana Politik Hukum dan Demokrasi Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka pelajar, 1999
- Huwaydi, Fahmi., *Demokrasi, Oposisi, dan Masyarakat Madani*, terjemahan, Bandung: Mizan, 1996.
- Iskandar, A. Muhaimin., *Melampaui Demokrasi: Merawat Bangsa Dengan Visi Ulama*, Yogyakarta: KLIK R, 2006.
- Ismail, Faisal., *Ideologi Hegemoni dan Otoritas Agama: Wacana Ketegangan Kreatif Islam dan Pancasila*, cet. ke-1, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999.
- Kahin, George McT., *Nationalism and Revolution in Indonesia*, Solo: Pustaka Sinar Harapan dan UNS Press, 1995.
- Karim, M. Rusli., *Negara dan Peminggiran Islam Politik*, cet. ke-1, Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1999.
- Leaman, Oliver., *Pengantar Filsafat Islam: Sebuah Pendekatan Tematis*, Bandung: Mizan, 2001.
- Lewis, Bernard., *Bahasa Politik Islam*, alih bahasa Ihsan Ali Fausi, Jakarta: Gramedia, 1994.
- Masdar, Umaruddin., *Membaca Pikiran Gus Dur dan Amien Rais tentang Demokrasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999
- Maschan Moesa, Ali. *Nasionalisme Kiai: Konstruksi Sosial Berbasis Agama*. Yogyakarta: LKiS dan IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2007.
- Maududi., *Islamic Law and Constitution*, alih bahasa Khursihid Ahmad, edisi ke-10, Lahore: Islamic Publication, 1990.
- Mitcell, Richard P., *The Society of Muslim Brothers*, Oxford: Oxford University Press, 1969.
- Ma'arif, Ahmad Syafi'i., *Islam dan Politik: Teori Belah Bambu Masa Demokrasi Terpimpin 1959-1965*, cet. ke-1, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Mehden, Fred von den., *Religion and Modernization in South East Asia*, Syracuse: Syracuse University Press, 1986.
- Mangkusasmito, Prawoto., *Pertumbuhan Historis Rumus Dasar Negara dan Sebuah Refleksi*, Jakarta: Hudaya, 1970.

- Misrawi, Zuhairi dan Novriantoni., *Doktrin Islam Progresif: Memahami Islam sebagai Ajaran Rahmat*, Jakarta: LSIP, 2004.
- Muzadi, Hasyim., *Nahdlatul Ulama di Tengah Agenda Persoalan Bangsa*, Jakarta: Logos, 1999.
- _____., *Agenda Strategis Pemulihan Martabat Bangsa*, Jakarta: Pustaka Azhari, 2004.
- Nasution, Harun., *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*, cet. ke-5, Jakarta: UI Press, 1985.
- Noer, Deliar. *Pengantar ke Pemikiran Politik*, Medan: Dwipa, 1965.
- _____., *Islam, Pancasila dan Asas Tunggal*, Jakarta: Yayasan Perkhidmatan, 1983.
- _____., *Partai Partai Islam di Pentas Nasional 1945-1965*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1987.
- _____., *The Modernist Muslim Movement in Indonesia, 1900-1942*, Singapura: Oxford University Press, 1973.
- Prasetyo, Hendro dan Ali Munhanif, dkk., *Islam dan Civil Society: Pandangan Muslim Indonesia*, Jakarta: Gramedia Bekerja sama dengan PPIM-IAIN Jakarta, 2002.
- Poesponegoro, Marwati Djoened dan Nugroho Notokusanto, *Sejarah Nasional Indonesia*, vol. VI, Jakarta: Departemen P&K, 1984.
- Ramage, Douglas E., *Percaturan Politik di Indonesia: Demokrasi, Islam, dan Ideologi Toleransi*, alih bahasa Hartono Hadikusumo, cet. ke-1, Jogjakarta: Mata Bangsa, 2002.
- Rahman, Budhy Munawar (ed.), *Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah*, Jakarta: Paramadina, 1995.
- Rahardjo, M. Dawam., *Intelektual Intelegensia dan Prilaku Politik Bangsa: Risalah Cendekiawan Muslim*, Bandung: Mizan, 1993
- Syah, Ismail Muhammad dkk., *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1992.
- Sjadzali, Munawir., *Islam dan Tata Negara; Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, Edisi Kelima, Jakarta: UI-Press, 1993.
- Syafi'i, Kencana. *Al-Qur'an dan Ilmu Politik*. Jakarta: Rineka Cipta, 1996.

- Schmandt, Henry J. *Filsafat Politik; Kajian Historis Zaman Yunani Kuno Sampai Zaman Modern*. Jogjakarta: Pustaka Pelajar, 2002.
- Shodiq, Mohammad., *Dinamika Kepemimpinan NU, Refleksi Perjalanan K.H. Hasyim Muzadi*, Surabaya: LTN NU Jatim, 2004.
- Sahdan, Gregorius., *Transisi Demokrasi Indonesia Pasca Soeharto*, JogJakarta: Pondok Edukasi, 2004.
- Suhelmi, Ahmad., *Polemik Negara Islam: Soekarno Versus Natsir*, cet. ke-1, Bandung: Teraju, 2002.
- _____. *Pemikiran Politik Barat*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004.
- Schmandt, Henry J., *Filsafat Politik; Kajian Historis dari Zaman Yunani Kuno Sampai Zaman Modern*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.
- Soekarno, *Memudahkan Pengertian Islam, di Bawah Bendera Revolusi*, Jakarta: Panitia di bawah Bendera Revolusi, 1994.
- Syamsuddin, M. Din., *Etika Agama dalam Membangun Masyarakat Madani*, Jakarta: Logos, 2000.
- Toer, Pramoedya Ananta., *Rumah Kaca*, Cet. I, Jakarta: Hasta Mitra, 1988.
- Uhlin, Anders., *Oposisi Berserak: Arus Deras Demokratisasi Gelombang Ketiga di Indonesia*, Bandung: Mizan, 1998.
- Wahid, Hasyim dkk, *Telikungan Kapitalisme Global dalam Sejarah Kebangkitan Indonesia*, cet. ke-1, Yogyakarta: LKiS, 1999.
- Wahid, Abdurrahman., *Islam Indonesia Menatap Masa Depan*, Jakarta: P3M, 1989.
- Yamani, *Antara Al-Farabi dan Khomeini: Filsafat Politik Islam*, Bandung: Mizan, 2002.
- Yamin, Muhamad., *Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945*, Jakarta: Yayasan Prapanca, 1959.

Kelompok Lain

- Departemen Agama RI (pengawas), *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Madinah: tp, 26 Rajab 1415 H

Nur, Muhammad. *Islam Berbicara Tentang Cita-cita Politik Indonesia Baru*. Asy-Syir'ah, Vol. 36, No.I, 2002.

Olaf Schumann, “*Dilema Islam Kontemporer antara Masyarakat Modern dan Negara Islam,*” Jurnal Pemikiran Islam Paramadina, No, 2, Vol I , Jakarta: Paramadina, 1999.

Pengantar kumpulan tulisan dari Koran detikcom, Suara Pembaharuan, Kompas: *Kiprah PBNU 2000-2001, Analisa dan Evaluasi Pemberitaan tentang Kepemimpinan Hasyim Muzadi*, yang diterbitkan oleh eLKAPIM Malang, tanpa tahun.

Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi III, cet. II, Jakarta: Balai Pustaka, 2002.

Wahid, Hasyim., “*Pergerakan Mahasiswa dan Konsensus Nasional Bangsa*”, Makalah, disampaikan pada Rakernas PB PMII, 2005.

Diakses dari, http://id.wikipedia.org/wiki/Hasyim_Muzadi, pada Kamis, 02 Juli 2009

Diakses dari <http://www.antara.co.id/>, pada hari Senin, 06 Juli 2009.

Diakses dari <http://www.erasuslim.com/>, pada hari Senin, 29 Mie 2009

CURRICULUM VITAE

Nama : Misbahol Munir
Tempat/Tgl. Lahir : Sumenep, 10 Mei 1985
Alamat Asal : Jl. Pemuda Talesek Guluk – Guluk, Sumenep Jawa Timur
Kode Pos 69463 Telp/Hp: 081392462086.

ORANG TUA

Ayah : Muhabbir
Ibu : Latifah
Alamat : Jl. Pemuda Talesek Guluk – Guluk, Sumenep Jawa Timur
Kode Pos 69463

PENDIDIKAN

1. SDN. Pordapor Guluk – Guluk Lulus Tahun 1998
2. SLTP Terbuka Guluk – Guluk Lulus Tahun 2001
3. MA Nurul Jadid Paiton Probolinggo. Lulus Tahun 2004
4. Stara I (SI) Jurusan Aqidah Filsafat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Lulus Tahun. 2009

PENGALAMAN ORGANISASI

1. Wakil Ketua OSIS MA Nurul Jadid Paiton Probolinggo Tahun. 2002
2. Ketua Redaksi Majalah Kharisma MA Nurul Jadid Paiton Probolinggo Tahun. 2002
3. Ketua I IPNU PAC Paiton Probolinggo Tahun. 2003
4. Ketua I PMII Rayon Fakultas Ushuluddin Tahun. 2005-2006
5. Pimpinan Redaksi Majalah GEGER Rayon PMII Fak. Ushuluudin 2005-2006
6. Pimpinan Umum (PU) Majalah GEGER Rayon PMII Fak. Ushuluudin 2006-2007
7. Koordinator Pengkaderan PMII Komisariat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun. 2006-2007
8. Sekertaris Redaksi LPM Humaniush Fak. Ushuluddin UIN Suka Tahun. 2006-2007
9. Aktif di *Alitheia Institute* Jogjakarta
10. Sekretaris OSPeK UIN SU-KA periode 2006-2007
11. Redaktur Pelaksana Buletin *Ikhtilaf* Yayasan LKiS Yogyakarta 2007
12. Koordinator Bidang Pengkaderan Forum Silaturahmi Keluarga Mahasiswa Madura Jogjakarta (FSKMMJ) Tahun. 2008-2009
13. Ketua BEM Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga Tahun 2007-2009
14. Ketua I Pengurus Pusat Forum Mahasiswa Ushuluddin se-Indonesia (Formadina) 2007-2009
15. Koordinator Advokasi dan Jaringan PMII Cabang DIY Tahun. 2008-2010